Berikut rangkuman lengkap materi IPS kelas 9 bab 4 tentang Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi. Rangkuman ini disusun dari buku paket BSE K13 edisi revisi terbaru. Untuk mengakses rangkuman IPS yang lengkap semua bab, silahkan membuka halaman Rangkuman Materi IPS Kelas 9.

Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi

Persiapan yang dilakukan untuk kemerdekaan Indonesia yaitu Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei–1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada 10–17 Juli 1945.

Gagasan dasar negara yang dikemukakan oleh masing – masing tokoh yaitu :

No	Nama Tokoh	Waktu Penyampaian Pidato	Gagasan
1	Mr. Mohammad Yamin	29 Mei 1945	1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ke-Tuhanan; 4. Peri Kerakyatan; 5. Kesejahteraan Rakyat.
2	Mr. Soepomo	31 Juni 1945	1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Keseimbangan lahir dan batin; 4. Musyawarah; 5. Keadilan Rakyat.

Download dari situs https://wirahadie.com

3	Ir. Soekarno	1 Juni 1945	1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau Peri kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; 5. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Hasil rapat PPKI menghasilkan beberapa keputusan penting untuk membentuk NKRI, yaitu :

1. Pengesahan UUD 1945
2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
3. Pembagian Wilayah Indonesia
4. Pembentukan Kementerian

Susunan kabinet menteri Indonesia pertama yaitu :

Download dari situs https://wirahadie.com

No	Kementerian	Pejabat
1	Menteri Dalam Negeri	R.A.A. Wiranata Kusumah
2	Menteri Luar Negeri	Ahmad Soebardjo
3	Menteri Keuangan	A.A. Maramis
4	Menteri Kehakiman	Soepomo
5	Menteri Kemakmuran	Ir. Surachman Tjokroadisurjo
6	Menteri Keamanan Rakyat	Supriyadi
7	Menteri Kesehatan	dr. Boentaran Martoatmodjo
8	Menteri Pengajaran	Ki Hajar Dewantara
9	Menteri Penerangan	Amir Sjarifuddin
10	Menteri Sosial	Iwa Kusumasumantri
11	Menteri Pekerjaan Umum	Abikusno Tjokrosujoso
12	Menteri Perhubungan	a.i. Abikusno Tjokrosujoso
13	Menteri Negara	Wahid Hasyim
14	Menteri Negara	Otto Iskandardinata
15	Menteri Negara	Mr. R.H. Sartono
16	Menteri Negara	M. Amir

Peristiwa Rengasdengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. hal ini membuat para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia.

Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dirumah Laksamana Maeda. Ir. Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya yaitu 17 agustus 1945. Moh. Hatta dan Ahmad Subardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. kemudian naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik.

Download dari situs https://wirahadie.com

Perundingan Linggajati :

Delegasi	Kesepakatan	Dampak bagi Indonesia
Indonesia Sutan Syahrir (Ketua Delegasi) **Belanda** Wim Schermerhorn (Ketua Delegasi) **Inggris** Lord Killearn (Mediator perundingan)	• Belanda mengakui secara *de facto* wilayah Republik Indonesia, yaitu, Sumatra, Jawa, dan Madura. • Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. • Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), di mana salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. • Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam *Commonwealth* /persemakmuran Indonesia-Belanda dengan dengan ratu Belanda sebagai ketuanya	• Republik Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari beberapa negara, diantaranya Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Suriah, Afghanistan, Myanmar, Yaman, Saudi Arabia, dan Uni Soviet. • Muncul pihak yang mendukung dan menolak hasil perundingan di kalangan rakyat Indonesia. Sebagian rakyat Indonesia mengganggap hasil perundingan merugikan Indonesia.

Perundingan Renville :

Download dari situs https://wirahadie.com

Delegasi	Kesepakatan	Dampak bagi Indonesia
Indonesia Amir Syarifuddin Harahap (Ketua Delegasi) **Belanda** Abdul Kadir Widjojoatmodjo (Ketua Delegasi) **KTN** • Frank Porter Graham • Richard Kirby (Mediator perundingan)	• Penghentian tembak-menembak. • Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. • Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. • TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. • Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui masa peralihan terlebih dahulu.	Wilayah Indonesia menjadi sempit dan dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda.

Perundingan Roem-Royen :

Delegasi	Kesepakatan	Dampak bagi Indonesia

Download dari situs https://wirahadie.com

	Pihak Indonesia menyatakan kesediaan untuk: 1. Menghentikan perang gerilya 2. Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan 3. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag **Pihak Belanda menyatakan kesediaan untuk:**	
Indonesia Mr. Moh. Roem. (Ketua Delegasi) Belanda Dr. J. H. van Royen. (Ketua Delegasi) UNCI Merle Cochran (Mediator perundingan)	1. Menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta; 2. Menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik; 3. Tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1948 4. Berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta	Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.

Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui cara **diplomasi dan pertempuran.** Diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Belanda di antaranya adalah Perundingan Linggarjati, Renville, Roem-Royen, dan Konferensi Meja Bundar. Pertempurannya yaitu Pertempuran Surabaya, Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, dan Margarana.

Indonesia memperoleh kedaulatan setelah penandatanganan **Konferensi Meja Bundar** yang diselenggarakan di **Den Haag, Belanda. Tanggal 27 Desember 1949** dilakukan

Download dari situs https://wirahadie.com

penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS. Bentuk negara serikat yang disepakati pada Konferensi Meja Bundar tidak sesuai dengan cita-cita bangsa.

Pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS dan RI dengan keputusan inti kembali mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa politik yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer antara lain adalah tujuh kali pergantian kabinet, penyelenggaraan Pemilu pertama, **Dekrit Presiden 5 Juli 1959**, penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika, dan gangguan kemanan seperti, pemberontakan DI/TII, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan RMS, dan pemberontakan PRRI/Permesta.

Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda :

- a. Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
- b. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
- c. Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain

Tujuan dari sistem ekonomi Gerakan Banteng :

- a. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional
- b. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit
- c. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju

Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan masa Demokrasi Parlementer yaitu Gunting Syafruddin, sistem ekonomi gerakan banteng, nasionalisasi perusahaan asing, Finansial Ekonomi (Finek), dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT). Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan masa Demokrasi Terpimpin adalah Devaluasi Mata Uang Rupiah, dan mengeluarkan Deklarasi Ekonomi.

Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pada masa Orde Baru meliputi program jangka

Download dari situs https://wirahadie.com

pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Adapun program jangka panjang diwujudkan dengan pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik lima tahunan.

Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin yaitu :

1. Adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
2. Penyimpangan terhadap UUD 1945
3. Kekuatan Politik Nasional
4. Politik Luar Negeri

Isi dari Perjanjian New York yaitu :

1. Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962
2. Irian Barat akan berada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*) yang dibentuk PBB
3. Pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia
4. Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat (pepera) Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia, pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB.

Perkembangan Ekonomi masa Demokrasi Terpimpin yaitu :

1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)
2. Devaluasi Mata Uang Rupiah
3. Deklarasi Ekonomi

Perkembangan Politik Masa Orde Baru yaitu :

1. Dibentuknya Supersemar
2. Penataan Stabilitas Politik
3. Penyederhanaan Partai Politik
4. Pemilihan Umum
5. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
6. Dwi Fungsi ABRI

Langkah- langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik

Download dari situs https://wirahadie.com

yaitu :

1). Pemulihan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

2). Pemulihan Hubungan dengan Malaysia

3). Kembali Menjadi Anggota PBB

4). Ikut Memprakarsai Pembentukan ASEAN

Perkembangan Politik Masa Reformasi yaitu : Sidang Istimewa MPR 1998, Otonomi Daerah, Pencabutan Pembatasan Partai Politik, Penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan Penyelenggaraan Pemilu.

Upaya penanggulangan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dilakukan secara bertahap dan mulai menunjukkan hasilnya beberapa tahun kemudian.

Pada era reformasi, amanat UUD 1945 dalam bidang pendidikan mulai dilaksanakan dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20%.

Pada masa reformasi Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan masa reformasi, yaitu :

- a. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie
- b. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
- c. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri
- d. Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono

B.J Habibie menetetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi yaitu :

- a. Menjalin kerja sama dengan International Moneter Fund-IMF (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi
- b. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian
- c. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
- d. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00
- e. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri

Pada masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, nilai tukar rupiah terhadap

Download dari situs https://wirahadie.com

dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. dengan menerapkan kebijakan yaitu :

- a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar
- b. Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun
- c. Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Daftar Pustaka

Setiawan, I., Retno K.D.P., Suciati & Ach. Mushlih. 2018. *Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas IX*. Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Download dari situs https://wirahadie.com